

Melawan Kepunahan Becak Dengan Membentuk Becak Wisata Di Ponorogo

Norma Maharani^{1*}, Robby Darwis Nasution¹

¹Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 03 June 2020
Accepted 17 June 2020
Available online 30 June 2020

Kata Kunci:

Becak wisata; Wisata;
Kepunahan;
Modernisasi

Keywords:

Pedicab tours; Tourism;
Extinction;
Modernization

ABSTRAK

Di era globalisasi dan modernisasi saat ini, semua orang beralih menggunakan transportasi modern dan meninggalkan transportasi tradisional, hal ini dapat menyebabkan becak menjadi punah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam melawan kepunahan becak di Ponorogo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan informan Kepala Dinas Perdagkum, Kepala Dinas Pariwisata, dan Ketua Paguyuban Becak Kayuh Suromenggolo Ponorogo. Hasil dari penelitian ini, dalam membentuk becak wisata memerlukan proses dari pembentukan dan peresmian paguyuban becak, proses pencairan dana hibah, kemudian peresmian becak wisata. Kesimpulannya untuk melawan kepunahan becak atas munculnya modernisasi dimulai dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo membentuk becak wisata yang mencerminkan ciri khas Ponorogo dan beroperasi di 36 titik Kota Ponorogo dengan menggunakan atribut reog dan panadon.

ABSTRACT

In the current era of globalization and modernization, everyone is turning to use modern transportation and abandon traditional transportation, which can cause pedicabs to become extinct. The purpose of this study was to determine the Government's efforts in countering the extinction of the becak in Ponorogo. This research uses descriptive qualitative research with primary and secondary data sources. The informant selection technique uses a purposive sampling technique with informants from the Head of the Perdagkum Office, the Head of the Tourism Office, and the Head of the Becak Kayuh Suromenggolo Ponorogo Society. Informing a tourist rickshaw, the results of this study require the process of forming and inauguration of the rickshaw community, the process of disbursing grant funds, and the inauguration of a tourist rickshaw. The conclusion of fighting the pedicab extinction for the emergence of modernization began with the Government's policy to form a tourism pedicab that reflects the characteristics of Ponorogo and operates in 36 points in the City of Ponorogo by using the reog and panadon attributes.

1. Pendahuluan

Meningkatnya globalisasi dan modernisasi seakan menuntut setiap orang untuk mengikuti perkembangan yang ada, jika tidak maka akan tertinggal. Dimana hal tersebut dapat ditandai dalam perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju seperti sekarang ini. Ada yang beranggapan bahwa globalisasi adalah upaya penyatuan masyarakat dunia dari sisi gaya hidup, orientasi, dan budaya (Suneki, 2012). Namun hal tersebut tidak lantas membuat kita lupa akan budaya bangsa dan adatnya. Sebagai bangsa yang berbudi luhur, sepatutnya kita tetap menghargai dan melestarikan budaya Indonesia. Banyak kekayaan tradisional Indonesia yang masih terus dibudayakan dari zaman sebelum merdeka sampai saat ini, salah satunya adalah becak.

Tidak hanya sebagai moda transportasi manusia, becak menjadi sarana angkutan barang yang lebih fleksibel. Mampu menjangkau peta lokasi terdalam permukiman dengan daya tampung yang cukup besar. Dapat dimodifikasi sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan, khususnya dalam sarana angkutan barang. Sebagai sarana transfer orang dalam jarak yang relatif pendek, becak terbagi kedalam becak angkutan biasa dan becak wisata (Pandu Satriya Utama, 2019). Namun, jumlah tukang becak yang begitu banyak ini, tidak diimbangi dengan kenaikan jumlah penumpang. Hal ini dikarenakan saat ini semua orang sudah memiliki transportasi pribadi, yang dinilai lebih efisien dibandingkan harus mengendarai becak, sehingga menyebabkan becak sering beralih fungsi untuk mengangkat barang dibanding penumpang.

Seiring berjalannya waktu, di berbagai kota becak mulai dikembangkan menjadi becak wisata, seperti di Yogyakarta, Probolinggo, Blitar, Sumatera Utara dll. Tujuan dibentuknya adalah untuk menarik wisatawan asing maupun lokal, sehingga akan meningkatkan pendapatan daerah dan tukang becak tentunya sekaligus hal ini demi menyelamatkan becak dari kepunahan. Perbedaan antara becak wisata dengan becak biasa adalah becak wisata ditujukan untuk mengangkut wisatawan yang datang ke daerah tersebut, sedangkan becak biasa hanya mengangkut penumpang lokal atau mengangkut barang (Abul Haris Suryo Negoro, 2019).

Di era globalisasi ini becak telah kalah dengan transportasi yang modern dan berbasis online, dimana hal ini dapat menjadi ancaman yang bisa mematikan perekonomian tukang becak dan memusnahkan becak sebagai kekayaan tradisional Indonesia. Mengingat kondisi masyarakat Ponorogo yang mata pencahariannya sebagai tukang becak sangat banyak, hal ini menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo untuk berupaya memberikan kebijakan terbaik sebagai upaya pelestarian becak dan bagi peningkatan ekonomi penduduknya, dengan cara membentuk becak wisata.

Pembentukan becak wisata ini juga didasari dari konflik antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan tukang becak montor (bentor), dimana keberadaan bentor ini dilarang oleh Pemerintah kabupaten Ponorogo. Berbeda dengan bentor yang ada di Sumatera Utara, yang biasa disebut Becak Siantar yang digerakkan menggunakan mesin sepeda motor merk BSA (Birmingham Small Arm) yang tetap diperbolehkan beroperasi di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan becak ini telah menjadi ikon unik kota yang telah ada sejak tahun 1960 (Warongan, 2014).

Hal tersebut tidak berlaku di Kabupaten Ponorogo, dikarenakan bentor tidak memenuhi standar transportasi, yang dapat membahayakan penumpangnya. Sehingga bentor dilarang tegas untuk beroperasi di Ponorogo. Oleh karena itu, menurut Dinas perdagkum Ponorogo dengan dibentuknya becak wisata ini, dianggap sebagai solusi dari permasalahan perekonomian tukang becak dan diharapkan dapat membuat tukang becak beralih kembali ke becak kayuh yang lebih aman serta melestarikan keberadaan becak kayuh dan dapat menarik minat wisatawan lokal maupun asing.

Penelitian tentang becak wisata yang pernah dilakukan yaitu tentang kualitas pelayanan becak wisata (Abul Haris Suryo Negoro, 2019), peran pemerintah dalam pengelolaan becak wisata (Pandu Satriya Utama, 2019), penguatan karakter pengemudi becak wisata (Sudarsih, Widisuseno, Wiyatasari, Mulyadi, & Rahmah, 2018), strategi adaptasi tukang becak (Mangata, 2016), dan strategi bertahan pengendara becak (Qoimudin, 2018).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih mengulas secara mendalam bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan tukang becak dalam proses perjuangan membentuk becak wisata. Dimana belum ada penelitian yang membahas proses pembentukan becak wisata ini secara detail, untuk itu penelitian ini akan dapat memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

Berdasarkan persoalan yang dibahas dalam latar belakang diatas, maka akan lebih menarik apabila dibahas lebih mendalam tentang bagaimana upaya Pemerintah dalam melawan kepunahan becak di Kabupaten Ponorogo, selain itu penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu agar lebih mengetahui bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam melawan kepunahan becak dan dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Warul Walidin "Penelitian kualitatif merupakan suatu metode berganda dalam fokus, yang melibatkan suatu pendekatan interpretatif dan wajar terhadap setiap pokok permasalahannya. Ini berarti penelitian kualitatif bekerja dalam *setting* yang alami, yang berupaya untuk memahami, memberi tafsiran pada fenomena yang dilihat dari arti yang diberikan orang-orang kepadanya. Penelitian kualitatif melibatkan penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan empiris, seperti studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, riwayat hidup, wawancara, pengamatan, teks sejarah, interaksional dan visual: yang menggambarkan momen rutin dan problematis, serta maknanya dalam kehidupan individual dan kolektif" (Warul Walidin AK, Saifullah, 2015).

Lokasi penelitian yang dipilih adalah di Kabupaten Ponorogo. Sumber data yang digunakan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung mengenai upaya pembentukan becak wisata dengan tukang becak dan Dinas-dinas yang berwenang menanganinya. Data yang disajikan sesuai dengan data yang diperoleh dari lapangan. Sumber data sekunder diperoleh dari hasil kajian pustaka, melalui artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

Untuk teknik pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Dr. J. R. Raco "Sampel bagi metode kualitatif sifatnya *purposive* artinya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Sampel metode kualitatif tidak menekankan pada jumlah atau keterwakilan, tetapi lebih kepada kualitas informasi, kredibilitas dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh informan atau partisipan" (Raco, 2010). Berdasarkan penjelasan tersebut maka informan yang sesuai dengan penelitian ini adalah Kepala Dinas Perdagkum, Kepala Dinas Pariwisata, dan Ketua Paguyuban Becak Kayuh Suromenggolo Ponorogo.

Analisa data yang digunakan dimulai dengan memberikan gambaran secara rinci dan detail bagaimana Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam proses pembentukan becak wisata, yang ditinjau pula dengan bagaimana proses terbentuknya becak wisata ponorogo. Berdasarkan semua data yang diperoleh, maka selanjutnya dapat disusun secara sistmeatis dengan memilah poin-poin yang penting dan menyimpulkannya. penyusunan data, reduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan, setelah data tersebut dikategorikan dan di analisis maka kemudian disimpulkan agar dapat dipahami oleh pembaca.

3. Hasil Dan Pembahasan

Menjadi tukang becak mungkin bukan merupakan cita-cita dari para tukang becak yang ada di Ponorogo. Karena tuntutan kebutuhan hidup, minimnya lapangan pekerjaan dan kurangnya menempuh pendidikan mengharuskan mereka untuk menjadi tukang becak, bahkan ada yang karena mewarisi pekerjaan orang tuanya. Banyaknya persyaratan untuk bekerja disektor formal membuat mereka (tukang becak) harus rela bekerja disektor informal. Menarik becak adalah sebuah pekerjaan yang hanya mengandalkan kekeuatan fisik dan stamina saja. Selain itu, sebagai salah satu pekerjaan di sektor informal, menarik becak tidaklah membutuhkan status pendidikan yang tinggi (Mangata, 2016).

Di Ponorogo tidak sedikit tukang becak yang beralih dari becak kayuh menjadi menggunakan becak montor (bentor), namun keberadaan bentor ini dilarang oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo karena tidak memenuhi standar keamanan transportasi, hingga pernah terjadi demo yang dilakukan oleh tukang becak montor yang menuntut agar bentor diijinkan beroperasi, namun Pemerintah tetap kukuh untuk melarangnya, bahkan apabila terdapat yang melanggar larangan ini juga akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menegaskan: (1) Kendaraan terdiri atas: a. Kendaraan Bermotor; dan b. Kendaraan Tidak Bermotor. (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis: a. sepeda motor; b. mobil penumpang; c. mobil bus; d. mobil barang; dan e. kendaraan khusus. (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi: a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan b. Kendaraan Bermotor Umum. Penegasan Pasal 47 ayat (1), (2) dan (3) tersebut, bahwa becak motor tidak termasuk sebagai alat transportasi kendaraan bermotor umum, jadi dapat dikatakan keberadaannya selama ini ilegal dan melanggar hukum. Walaupun demikian aktivitas bentor umum telah lama berlangsung di masyarakat di beberapa daerah di Indonesia (Suryani & Mashdurohatun, 2016).

Di berbagai daerah di Indonesia, juga masih banyak masyarakatnya yang memilih menjadi tukang becak sebagai pekerjaan tetap mereka untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, meskipun saat ini banyak transportasi modern tetapi hal itu tidak menyurutkan semangat para tukang becak untuk tetap bertahan pada profesinya. Satu-satunya kota di Indonesia yang secara resmi melarang keberadaan becak adalah Jakarta. Becak dilarang beroperasi di Jakarta sekitar akhir dasawarsa 1980-an. Alasan resminya antara lain kala itu ialah bahwa becak adalah "eksploitasi manusia atas manusia". Sebagai penggantinya adalah heli-cak, bajaj, kancil, dan belakangan juga ojek motor (Suryani & Mashdurohatun, 2016).

Di era globalisasi sekarang ini, pemerintah dituntut untuk mengembangkan potensi daerahnya di tengah segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, agar mampu bersaing dalam ekonomi global. Gelinas membedakan globalisasi dalam tiga jenis yaitu *pertama* globalisasi sebagai sistem yang menciptakan integrasi secara meluas di bidang jaringan produksi dan konsekuensinya melakukan "perampasan" teknologi, etika, dan budaya melalui penanaman modal langsung yang mengubah hubungan antarnegara dan berdampak terhadap ruang ekonomi domestik dan iklim budaya negeri. *Kedua*, globalisasi sebagai proses yang merupakan serangkaian tindakan untuk mencapai proses integrasi mendunia melalui keharusan berkompetisi menekan korporasi global secara tetap dan terus-menerus dimana sumber keuangan dan teknologi ditingkatkan secara signifikan. *Ketiga*, globalisasi sebagai ideologi yang merupakan suatu konsep kerangka pemikiran, pandangan dan gagasan yang menentukan sifat dari kebenarannya dalam suatu masyarakat tertentu (Atmasasmita, 2014)

Persaingan dalam ekonomi global menuntut setiap negara untuk terus berkembang dan berinovasi agar negaranya cukup berdaya saing dan mampu dipandang dalam industri ekonomi internasional. Berbagai upaya dilakukan dari berbagai bidang baik politik, sosial, budaya, ekonomi, dll. Hal ini memberikan dampak terhadap budaya dan tradisi masyarakatnya. Di era globalisasi sekarang ini masyarakat dituntut untuk mengikuti perkembangan yang ada, hal ini dikarenakan perkembangan pasar global yang semakin maju dengan menggunakan sistem pengelolaan dan teknologi modern, dimana hal ini menuntut setiap orang untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dengan meninggalkan kebiasaan lama. Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor pendukung utama dalam globalisasi. Perkembangan teknologi begitu cepat sehingga segala informasi dengan berbagai bentuk dan kepentingan dapat tersebar luas ke seluruh dunia. Oleh karena itu globalisasi tidak dapat kita hindari kehadirannya (Suneki, 2012).

Fenomena globalisasi adalah dinamika yang paling strategis dan membawa pengaruh dalam tata nilai dari berbagai bangsa termasuk bangsa Indonesia. Sebagian kalangan menganggapnya sebagai ancaman yang berpotensi untuk menggulung karakter bangsa dan budaya lokal, tata nilai dan tradisi bangsa kita, malah menggantinya dengan tata nilai yang bercorak pragmatisme dan populerisme asing yang jelas-jelas tidak sesuai dengan kepribadian

bangsa kita. Di pihak lain, globalisasi adalah juga sebuah fenomena alami, sebuah fragmen dari perkembangan proses peradaban yang harus kita lalui bersama (Budiwibowo, 2016).

Dampak yang diberikan akibat globalisasi ini sangat luar biasa, baik berupa dampak positif maupun negatif. Meskipun demikian, dengan adanya globalisasi tidak mengharuskan kita untuk mengikutinya sampai mengalihkan ideologi atau pandangan kita, kita mampu hidup berdampingan dengan era globalisasi ini dengan bersikap positif, tidak melupakan tradisi, dan terus berinovasi untuk berdaya saing yang sehat. Seperti yang telah dikemukakan oleh Gelinas bahwa konsekuensi dari globalisasi adalah perampasan teknologi, etika, dan budaya. Perlunya penanaman keyakinan dari diri setiap individu untuk melestarikan budaya bangsa warisan nenek moyang dan pendidikan karakter berdasarkan prinsip Pancasila sejak dini agar masyarakat Indonesia senantiasa berpegang teguh dengan budaya bangsa sehingga meskipun dengan adanya globalisasi lantas tidak membuat kita melupakan jati diri.

Menurut Sri Sudarsih, kini becak sebagai alat angkutan nasibnya kian terpojok oleh perkembangan jaman, maka *positioning* becak sebagai angkutan wisata kota adalah pilihan yang bijaksana. Pengemudi becak pun posisinya menjadi penting ketika dia sekaligus menjadi pemandu wisata. Pengemudi becak menjadi ujung tombak pariwisata kota (Sudarsih et al., 2018). Hal inilah yang melatarbelakangi Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk membentuk wisata baru yaitu becak wisata di tengah kemajuan sistem transportasi saat ini dimana becak sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakatnya.

Proses pembentukan becak wisata ini di mulai dari inisiatif Polres Ponorogo dan Dinas Perdagkum yang tertarik menjadikan becak menjadi potensi wisata yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah, sekaligus sebagai upaya melawan kepunahan becak di zaman modern seperti saat ini. Harapannya dengan dibentuk becak wisata, para tukang becak dapat termotivasi untuk terus menjalani pekerjaannya sebagai wujud pelestarian becak sebagai kekayaan tradisional Indonesia, khususnya di Kabupaten Ponorogo, sekaligus mengalihkan becak kepada fungsinya dari becak montor ke becak kayuh.

Bagi tukang becak tradisional atau becak kayuh, keberadaan becak montor bukan dianggap sebagai saingan, hal ini dikarenakan becak tradisional lebih terfokus pada pemenuhan kebutuhannya untuk memperoleh penghasilan. Hal terpenting bagi mereka hanyalah memperoleh penghasilan setiap harinya. Sehingga keberadaan becak montor tidak berpengaruh signifikan dalam hal penghasilan tukang becak kayuh atau tradisional (Qoimudin, 2018). Menurut mereka yang menjadi ancaman bagi becak ini adalah ojek online, dimana fasilitas yang diberikan sangat memadai dan lebih diminati oleh kalangan masyarakat, sehingga pernah terjadi protes dari tukang becak ke Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk melarang ojek online beroperasi, namun hal ini tidak mendapat persetujuan dari pemerintah.

Pengembangan pariwisata mengacu pada beberapa konsep, seperti konsep pembangunan berkelanjutan, konsep pengembangan wilayah terpadu, konsep pengembangan produk, konsep pengembangan pemasaran dan investasi, konsep kelembagaan, dan konsep pengembangan lingkungan. Strategi pada prinsipnya berkaitan dengan suatu persoalan seperti kebijakan pelaksanaan, penentuan tujuan yang hendak dicapai, dan penentuan cara atau metode penggunaan sarana-prasarana yang ada (Sefira Ryalita Primadany, Mardiyono, 2013). Sehingga pembentukan becak wisata ini merupakan suatu aset pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan potensi dan sarana yang ada di Ponorogo menjadi sebuah aset wisata yang dapat meningkatkan pendapatan penduduknya.

Becak wisata tentunya menawarkan sesuatu yang berbeda, memberikan jasa pelayanan kepada segmen khusus yaitu wisatawan. Fungsi becak wisata tidak hanya sebatas sebagai moda transportasi dan hanya mengandalkan fungsi penghantaran, tetapi juga menjadi front liner yang berhadapan langsung dengan segmen khusus, yaitu wisatawan. Dalam kaitan dengan pariwisata, menjadi keharusan untuk memberikan penambahan fungsi-fungsi lain sebagai wujud manifestasi becak wisata." (Pandu Satriya Utama, 2019)

Untuk membentuk wisata baru tidaklah mudah, memerlukan beberapa pertimbangan dan persetujuan dari berbagai pihak, serta menyesuaikan dengan dampak yang ditimbulkan dengan adanya wisata ini bagi masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu sebelum

membentuk becak wisata, Polres Ponorogo bersama Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengumpulkan seluruh tukang becak di Kabupaten Ponorogo untuk membahas rencana pembentukan becak wisata ini. Kebijakan ini disambut baik oleh para tukang becak dan masyarakat. Jika dalam penelitian (Pandu Satriya Utama, 2019) menjelaskan becak wisata di Probolinggo membuka wisata tour untuk wisatawan dari kapal pesiar untuk berkeliling di Kota Probolinggo, maka di Kota Ponorogo aktivitas wisata yang dilakukan adalah dengan berkeliling mengunjungi wisata budaya khas Ponorogo, seperti alun-alun, museum reog, pusat oleh-oleh khas Ponorogo seperti sate, jenang, gethuk golan dll. Dimana semua tempat ini berada di wilayah Kota Ponorogo yang merupakan titik keberadaan becak wisata.

Perencanaan sebuah kawasan pariwisata baru, memerlukan upaya pembangunan dalam penyediaan fasilitas-fasilitas pendukung seperti infrastruktur dan amenity core yang merupakan suatu keperluan mutlak yang harus tersedia, terlebih jika pariwisata tersebut memiliki potensi alam dan kebudayaan unik yang menjadi daya tarik tersendiri, maka secara signifikan akan menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Namun tetap harus mempertimbangkan keterlibatan masyarakat sebagai pengelola pariwisata, karena masyarakat merupakan bagian dari *stakeholder* dari pariwisata tersebut dan juga sebagai pihak yang merasakan dampak langsung dari pengembangan pariwisata tersebut, baik berupa dampak positif maupun negatif (Mukhsin, 2017). Untuk itu fasilitas-fasilitas pendukung yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo kepada tukang becak berupa pemberian bantuan yang digunakan untuk menunjang tampilan becak wisata.

Pada Bulan Oktober 2018, sebanyak 363 tukang becak berkumpul di paseban alun-alun Ponorogo. Tujuan awal dikumpulkannya tukang becak ini adalah untuk sosialisasi mengenai lalu lintas, mengingat banyak tukang becak kayuh yang sudah beralih fungsi menjadi bentor atau becak motor, dimana keberadaan bentor ini dilarang karena merupakan suatu pelanggaran standar keamanan transportasi. Melihat antusias dan kekompakan para tukang becak, hal ini dilirik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo bersama Polres Ponorogo, kemudian mengumpulkan kembali para tukang becak di Gedung Sasana Praja Ponorogo, dimana saat itu didatangi oleh sebanyak 416 tukang becak untuk menjadikan potensi becak kayuh ini menjadi becak wisata.

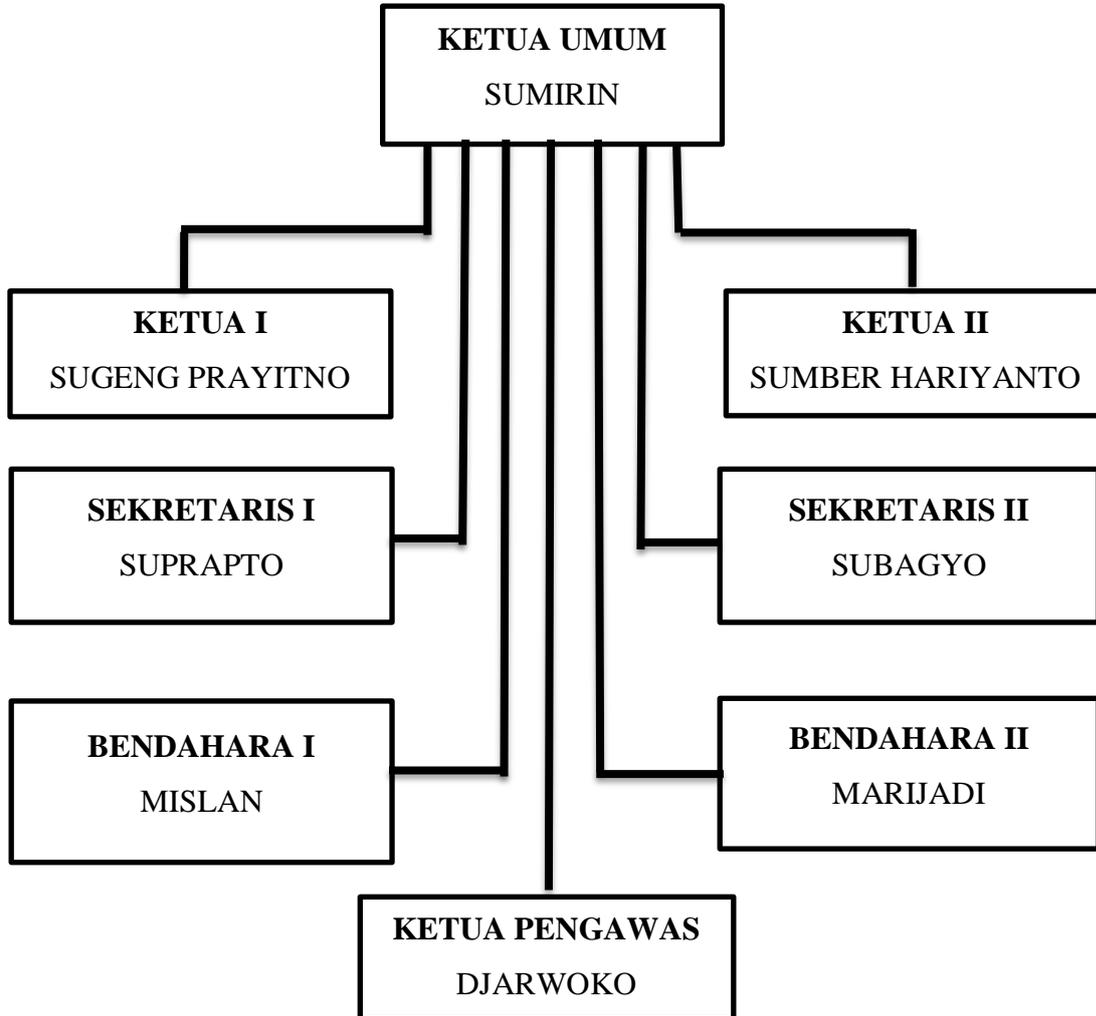
Proses perencanaan becak wisata ini dilimpahkan ke Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo yang juga dibantu oleh dinas dan instansi lain. Membutuhkan waktu kurang lebih dua tahun agar becak wisata ini dapat terbentuk, yaitu sejak tahun 2018 hingga kemudian diresmikan pada tahun 2020 oleh Bupati Ipong Muchlissoni. Pembentukan becak wisata ini, harus memenuhi syarat-syarat tertentu, mulai dari proses pembentukannya, proses pemenuhan administrasinya, hingga proses peresmian becak wisata. Awalnya tukang becak di Ponorogo belum mempunyai paguyuban, mereka saling berkelompok sesuai dengan area pangkalan mereka. Untuk itu hal pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah membentuk paguyuban becak kayuh, yang kemudian diberi nama Paguyuban Becak Kayuh Suromenggolo Ponorogo pada tahun 2018. Nama ini dipilih agar lebih keponorogoan, mengingat Suromenggolo merupakan tokoh yang membatat Ponorogo.

Pengembangan obyek dan daya tarik wisata merupakan penggerak utama dari suatu sektor kepariwisataan yang membutuhkan kerjasama antara pemangku kepentingan yaitu masyarakat dan pemerintah serta pihak swasta. Pemerintah sebagai pihak fasilitator memiliki peran dan fungsi tersendiri dalam pengaturan seluruh kebijakan terkait dengan pengembangan obyek dan daya tarik wisata dengan perencanaan yang sebaik mungkin, hal ini dikarenakan obyek dan daya tarik wisata merupakan faktor utama yang membuat wisatawan tertarik untuk mengunjungi obyek wisata tersebut (Devy & R.B. Soemanto, 2017). Sehingga diharapkan dengan dibentuknya becak wisata ini dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Ponorogo.

Paguyuban Becak Kayuh Suromenggolo ini diketuai oleh Bapak Sumirin atau lebih akrab dipanggil dengan sebutan Pak Sogol. Paguyuban ini beranggotakan 388 tukang becak yang berasal dari daerah yang berbeda-beda di Kecamatan Ponorogo. Dalam mengelola paguyuban ini

Pak Sogol dibantu oleh tujuh pengurus lain, dimana struktur kepengurusannya dapat dilihat dalam bagan berikut ini :

SUSUNAN ORGANISASI PERKUMPULAN BECAK KAYUH SUROMENGGOLO PONOROGO



Gambar 1. Susunan Organisasi Paguyuban Becak Kayuh Suromenggolo Ponorogo
Sumber: Paguyuban Becak Kayuh Ponorogo

Berdasarkan pernyataan Bapak Sumirin syarat untuk mendaftar sebagai anggota Paguyuban Becak Kayuh Suromenggolo yaitu setiap tukang becak harus terdaftar dalam kelompok yang terdiri minimal sepuluh orang. Tukang becak yang memenuhi syarat dapat memperoleh kartu anggota Paguyuban Becak Kayuh Suromenggolo. Biaya proses pembuatannya sebesar Rp. 5.000. Dalam kartu anggota tersebut dilengkapi dengan biodata dan kewajiban anggota, serta terdapat ketentuan pencabutan hak keanggotaan apabila terbukti melanggar peraturan lalu lintas.



Gambar 2. Kartu Anggota Paguyuban Becak Kayuh Suromenggolo Ponorogo
Sumber: Paguyuban Becak Kayuh Ponorogo

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bapak Sumirin, proses selanjutnya yaitu pengurus paguyuban wajib membuat NPWP. NPWP ini digunakan dalam administrasi untuk membuat akta notaris sebagai syarat memperoleh dana hibah becak wisata. Untuk keperluan administrasi notaris ini memerlukan biaya sebanyak Rp. 2.800.000. Akta notaris tersebut diserahkan ke Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya dikirimkan ke Pemerintah Pusat untuk meresmikan pembentukan paguyuban hingga pada akhirnya Paguyuban Becak Kayuh Suromenggolo diresmi disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu Cahyo Rahadian Mushar, S.H., LL.M. pada tanggal 25 Maret 2019.

Selain memiliki kartu keanggotaan, pengemudi becak juga diharapkan kedepannya memiliki SIOKTB (Surat Ijin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor) seperti yang sudah berlaku di Kota Yogyakarta. Hal tersebut dikemukakan dalam penelitian Trisnawati dan Broto (2014) yang mengemukakan bahwa pentingnya bagi pengemudi becak wisata memiliki SIOKTB tersebut adalah memberikan regulasi untuk menjaga ketertiban pengemudi becak wisata di jalan raya, karena kedepannya jika jumlah pengemudi becak semakin banyak dikhawatirkan akan menjadi masalah karena dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas, apalagi tidak tersedia jalur khusus yang disediakan untuk becak wisata tersebut.

Berdasarkan informasi dari wawancara bersama Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo, dana hibah yang digunakan untuk membentuk becak wisata ini berasal dari APBD Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2019. Dalam penentuan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan yang tercantum dalam RAB. Proposal dibuat oleh Ketua Paguyuban Becak Kayuh Suromenggolo bersama pengurus yang dibantu oleh Dinas Perdagkum Ponorogo. Instansi yang menangani dana hibah ini secara umum yang menangani anggaran itu BAPPEDA dan secara teknis dari Dinas Perdagkum yang berkaitan langsung dengan penerima manfaat serta pembinaan dan pengawasannya yaitu dari Dinas Pariwisata. Setelah proposal jadi, dana hibah ini dapat cair dengan nominal sebesar Rp. 358.900.000.

Dana ini diberikan untuk anggota yang bergabung dalam paguyuban dan tidak langsung diberikan kepada tukang becak, tetapi oleh pengurus dibelanjakan untuk keperluan becak wisata dimana setiap orang akan memperoleh hak yang sama. Keperluan ini berupa panadon, kursi penumpang, gambar reog, payung becak wisata, cat, sembako, dan apabila ada sisa uang maka akan diberikan. Keperluan tersebut digunakan sebagai pembeda atau ciri khas becak wisata dibandingkan dengan becak biasa, dimana tukang becaknya menggunakan panadon yang merupakan pakaian tradisional khas ponorogo dan becaknya dicat dengan warna sama, serta di payung becak bertuliskan becak wisata ponorogo.

Dana diberikan di kantor DPRD Kabupaten Ponorogo dengan pemberian dana hibah sebesar Rp. 358.900.000 yang diberikan oleh Addin Andanawarih yang merupakan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Perdagkum) Kabupaten Ponorogo pada tanggal 30

Desember 2019 untuk peresmiannya akan dihadiri oleh sebanyak 388 tukang becak yang tergabung dalam Paguyuban Becak Kayuh Suromenggolo Ponorogo (Kominfo, 2019). Pemberian dana ini ditandatangani oleh Ketua DPR, Kepala Dinas Perdagkum, Sekda, Kapolres, Dandim, Kepala Pengadilan, Kepala Perhubungan dan 36 orang pengurus Paguyuban Becak Kayuh Suromenggolo. Dalam pemberian dana ini dicantumkan dalam perjanjian hibah, dimana dana yang diberikan harus digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan RAB dan apabila dana ini disalahgunakan maka dapat di tindak pidana penyalahgunaan .



Gambar 3. Penyerahan Dana Hibah Ke Paguyuban Becak Kayuh Suromenggolo
Sumber: Pemerintah Kabupaten Ponorogo

Peresmian becak wisata dimulai pada tanggal 4 Januari 2020, terdapat pertemuan antara pengurus paguyuban becak kayuh suromenggolo dengan Pemerintah Kabupaten Ponorogo di Gedung Lantai 8 Pemkab Ponorogo untuk membahas mengenai persiapan keperluan becak wisata dan pengecatan becak massal. Kemudian pada tanggal 17 Januari 2020 dilakukan kegiatan mengecat massal di Paseban Alun-alun Ponorogo yang diikuti oleh seluruh anggota Paguyuban Becak Kayuh Suromenggolo sekaligus penyerahan bantuan dan panadon yang dilakukan oleh Bupati Ipong Muclissoni di Paseban Alun-alun Ponorogo.

Peresmian becak wisata dilakukan pada tanggal 1 Februari 2020, yang diawali dengan sholat subuh berjamaah di Masjid Agung Ponorogo, kemudian kirab mengelilingi kota dengan menggunakan pakaian reog atau panadon dengan atribut lengkap, yang sudah diberikan ke seluruh anggota Paguyuban Becak Kayuh Suromenggolo. Jika dalam penelitian (Warongan, 2014) menjelaskan tentang becak BSA sebagai obyek wisata sejarah di Kota Pematangsiantar, maka di Kota Ponorogo becak wisata suromenggolo inilah yang menjadi obyek wisata sejarah khas Ponorogo.

Kegiatan selanjutnya adalah membuat laporan pertanggungjawaban untuk dana hibah yang diberikan. Hal ini dilakukan agar menjadi bukti bahwa dana hibah yang diberikan telah digunakan sebagaimana mestinya. Becak wisata di Ponorogo ini tersebar dalam 36 titik pangkalan, dimana disetiap titik pangkalan becak ini terdapat satu ketua yang mengkoordinir wilayahnya dan bertanggung jawab kepada ketua umum becak wisata. Setiap titik ini terdiri dari sekitar 10-30 tukang becak yang berasal dari berbagai kecamatan yang berbeda-beda.



Gambar 4. Becak Wisata Ponorogo
Sumber: Data Pribadi

Langkah selanjutnya yang masih direncanakan oleh Dinas Perdagkum Ponorogo yaitu pembuatan koperasi. Menurut Dinas Perdagkum, dahulu pernah dibentuk koperasi untuk tukang becak, namun tidak berjalan lancar. Kini koperasi tersebut akan diaktifkan kembali dan yang mengelola adalah pihak paguyuban itu sendiri sesuai dengan kemampuannya, hal ini demi kesejahteraan seluruh anggota Paguyuban Becak Kayuh Suromenggolo Ponorogo.

Berdasarkan langkah-langkah dalam pembentukan becak wisata diatas, dapat dipersingkat dalam Gambar 5.



Gambar 5. Langkah-langkah pembentukan becak wisata ponorogo

Perlu adanya penguatan karakter juga bagi tukang becak seperti dalam (Sudarsih et al., 2018) yang mengatakan bahwa menjadi pemandu wisata bagi pengemudi becak sebagai salah satu sisi dari mata uang antara pengemudi dan pemandu. Karena itu karakter adalah modal dasar untuk mencapai tingkat kepuasan pelayanan penumpang. Karakter pengemudi becak ini sangat berpengaruh terhadap penilaian penumpangnya untuk itu Pemerintah perlu memberikan sosialisasi agar becak wisata ini dapat terus berjalan dengan baik.

Untuk langkah selanjutnya dari Dinas Pariwisata Ponorogo masih dalam tahap perencanaan dalam pengelolaan becak wisata ini, sehingga belum ada data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya dapat membahas mengenai upaya dari Dinas Pariwisata ini dalam mengelola dan mengembangkan becak wisata di Kabupaten Ponorogo.

Pelatihan bahasa inggris dan keterampilan kepemanduan wisatawan merupakan suatu hal yang penting untuk direncanakan bagi para tukang becak, seperti penelitian yang dilakukan oleh Hutama dan Abul (2019) mengemukakan bahwa dengan pelatihan bahasa inggris

diharapkan para pengemudi becak wisata memiliki kemampuan berbahasa Inggris dasar yang sangat bermanfaat dalam mendukung komunikasi dengan wisatawan asing terutama dalam memberikan informasi dan petunjuk yang relevan. Selain itu pelatihan pemanduan juga penting agar dapat memberikan pelayanan yang baik sehingga berkesan bagi para wisatawan yang menggunakan jasa becak wisata tersebut.

Becak telah cukup lama menjadi bagian penting dari pariwisata kota sejak kemunculannya pertama kali di jalan-jalan kota. Kesederhanaan, dan kerja keras yang dicerminkan dari sebuah becak dan keunikan becak yang dimiliki dari berbagai daerah di Indonesia inilah yang menjadi daya tarik pariwisata di Indonesia yang seharusnya perlu dihargai dan dilestarikan (Suryani & Mashdurohatun, 2016). Untuk itu penting bagi generasi penerus untuk melestarikan becak ini agar tidak punah tertinggal zaman.

4. Simpulan Dan Saran

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam upaya melawan kepunahan becak di era globalisasi dan modernisasi ini yaitu dengan membentuk becak wisata. Selain itu juga sebagai upaya untuk mengalihkan tukang *becak montor* keasalnya yaitu becak kayuh. Dalam proses pembentukannya memerlukan upaya yang tidak mudah, dari mulai pembentukan paguyuban becak, proses pencairan dana hibah, hingga akhirnya becak wisata resmi disahkan. Adanya becak wisata ini diharapkan dapat menarik minat wisatawan lokal maupun asing untuk berkunjung ke Ponorogo. Selanjutnya Pemerintah perlu melakukan pengelolaan yang lebih baik lagi agar becak wisata ini dapat terus berkelanjutan dan dapat menjadi aset wisata unggulan di Ponorogo. Penelitian ini masih belum sempurna, karena keterbatasan data yang diperoleh. Sehingga untuk penelitian selanjutnya perlu pembahasan yang lebih mendalam terkait dengan bagaimana keberlangsungan becak wisata dan evaluasinya.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang membantu demi terselesainya penelitian ini yaitu kepada Dinas Perdagang Ponorogo, Dinas Pariwisata Ponorogo, Paguyuban Becak Kayuh Suromenggolo Ponorogo dan Bapak Robby Darwis Nasution, S. IP, MA selaku Dosen Pembimbing Universitas Muhammadiyah Ponorogo serta pihak-pihak lain yang turut mendukung dalam proses penggalan data.

Daftar Rujukan

- Abul, H.S., Pandu. S. H. (2019). Kualitas Pelayanan Becak Wisata pada Wisatawan Kapal Pesiar di Kota Probolinggo. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 3(2), 77–84.
- Atmasasmita, R. (2014). *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori Dan Praktik Di Era Globalisasi* (edisi pert). Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Budiwibowo, S. (2016). Membangun Pendidikan Karakter Generasi Muda Melalui Budaya Kearifan Lokal Di Era Global. *Premiere Educandum: Jurnal Pendidikan Dasar Dan Pembelajaran*, 3(1), 39–49. <https://doi.org/10.25273/pe.v3i01.57>
- Devy, H. A., & R.B. Soemanto. (2017). Pengembangan Obyek Dan Daya Tarik Wisata Alam Sebagai Daerah Tujuan Wisata Di Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Sosiologi DILEMA*, 32(1), 34–44.
- Hutama, P.S., Abul. H. S. (2019). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Becak Wisata Kota Probolinggo. *Journal of Tourism and Creativity*, 3(2), 115–129.
- Kominfo. (2019). Bakal Ada Becak Wisata Di Ponorogo.
- Mangata, B. H. (2016). Strategi Adaptasi Tukang Becak Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi (Studi Kasus Tukang Becak di Kelurahan Bontobiraeng Kecamatan Mamajang Kota Makassar). *HOLISTIK, Tahun IX No. 18, IX(18)*, 1–22.
- Mukhsin, D. (2017). Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata Gunung Galunggung. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 14(1), 1–11. <https://doi.org/10.29313/jpwk.v14i1.2549>
- Qoimudin, A. B. Y. (2018). Strategi Bertahan Pengendara Becak Tradisional Terhadap Kemunculan Becak Motor Di Desa Cipari Kabupaten Cilacap. In *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*. Jakarta.

- Raco, J. . (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sefira Ryalita Primadany, Mardiyono, R. (2013). Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah (Studi Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(4), 135–143.
- Sudarsih, S., Widisuseno, I., Wiyatasari, R., Mulyadi, B., & Rahmah, Y. (2018). Penguatan Karakter Bagi Pengemudi Becak Wisata di Yogyakarta. *Jurnal "HARMONI,"* 2(1), 13–17. <https://doi.org/10.24235/jm.v2i1.1603>
- Suneki, S. (2012). Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi Budaya Daerah. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, II(1), 307–321.
- Suryani, M., & Mashdurohatun, A. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Becak Bermotor Umum (Bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Pembaharuan Hukum*, 3(1), 21–38.
- Trisnawati, Y., B. S. (2014). Keberadaan Moda Transportasi Umum Tidak Bermotor Dalam Mendukung Aktivitas Pariwisata di Kawasan Malioboro, Yogyakarta. *Jurnal Teknik PWK*, 3(4), 1013–1024.
- Warongan, B. I. (2014). Organizational culture on bsa owner motorcycle "siantar (bom"s) in pematangsiantar city Budaya Organisasi Pada BSA Owner Motorcycle' Siantar (BOM'S) Di Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 187–194.
- Warul Walidin AK, Saifullah, T. Z. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif & Grounded Theory* (I; Masbur, Ed.). Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.